

ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PENDIDIKAN

Helfinasyam Batubara

STITT Muhammadiyah Sibolga

Email: helfinasyam1909@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian dalam mengkaji perencanaan anggaran pendapatan belanja pendidikan yang ada di lembaga pendidikan atau satuan-satuan pendidikan, baik dari tingkat kebijakan (pemerintah) hingga kepada pelaksana di sekolah. Penelitian ini nantinya akan menemukan sebuah gambaran dan solusi terhadap permasalahan perencanaan anggaran belanja dan pendapatan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen studi dokumen ini bisa juga disebut sebagai studi pustaka, yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi dokumen dalam penelitian ini mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai konstruksi dan konsensus dalam kebenaran sejarah.

Kata kunci: *Rapbs Lembaga Pendidikan, Perencanaan Anggaran Pendidikan*

PENDAHULUAN

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki

cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargaikan dengan uang).

Di samping itu, dikenal juga anggaran belanja pendidikan (education budget) yang terdiri atas dua komponen, yaitu pendapatan, pemasukan atau penerimaan di satu pihak dan pengeluaran atau belanja. Dalam sistem anggaran di Indonesia alokasi biaya rutin kepada lembaga-lembaga atau satuan-satuan penyelenggara pendidikan dituangkan dalam DIK (daftar isian kegiatan), sedangkan biaya pembangunan dialokasikan dalam DIP (daftar isian proyek). Di samping itu dikenal pula DIKS (daftar isian kegiatan suplemen) yaitu, alokasi anggaran yang sumber dananya berasal dari masyarakat. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sektor pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

LANDASAN TEORI

Dalam buku landasan manajemen pendidikan, menurut Koonts penganggaran (budgetting) merupakan satu langkah perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu (Fatah, 1996: 68). Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang menuntut kemampuan sekolah untuk lebih aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan data secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian perencanaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksanakannya kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan lembaga pendidikan, artinya setiap program yang akan dilaksanakan pasti membutuhkan dan memerlukan anggaran lembaga yaitu biaya keuangan. Sehingga anggaran lembaga

yaitu komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya. Agar anggaran lembaga yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan, dapat dikelompokkan dalam tiga sumber, yaitu: (1) Pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik yang bersifat umum dan khusus dan diperuntukkan dalam lembaga pendidikan; (2) Orang tua atau peserta didik; (3) Masyarakat. Biaya yang dikeluarkan dalam suatu anggaran lembaga pendidikan antara lain yaitu biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan dari tahun ketahun, seperti gaji guru, pegawai dalam lembaga pendidikan, biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, alat-alat pengajaran, biaya pembangunan gedung, dan lain sebagainya.

Anggaran lembaga dalam komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti, dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, pengawasan, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, agar semua anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, serta bebas dari korupsi (Mulyasa, 2004: 48).

Menurut Jones dalam buku manajemen berbasis sekolah karya Dr. E Mulyasa, M.P.d menjelaskan bahwa tugas pengelola anggaran lembaga dibagi dalam tiga fase antara lain financial planning, implementation dan evaluation. Komponen utama dalam mengelola anggaran meliputi

- (a) Prosedur anggaran,
- (b) Prosedur akuntansi keuangan,
- (c) Pembelanjaan,
- (d) Prosedur investasi
- (e) Prosedur pemeriksaan.

Persoalan penting dalam penganggaran yaitu bagaimana pemanfaatan sumber-sumber secara efisien. Itulah sebabnya penganggaran memerlukan proses yang bertahap. Tahap-tahap yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran.
- (b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dan material.
- (c) Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.

- (d) Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati.
- (e) Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan) dalam tahap ini dilakukankompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara objektif dan subjektif.

Dalam mendesain budget terdapat bentuk: (1) Penganggaran butir per butir. Bentuk penganggaran ini memudahkan kontrol pengeluaran biaya, tetapi tidak membantu untuk pengambilan keputusan; Program *budget*. Bentuk ini menekankan pada sasaran-sasaran konkret dinyatakan dalam pernyataan fungsional. Oleh karena itu, penganggaran berdasarkan program mengharuskan diadakan pemilihan sasaran dan alokasi sumber berdasarkan analisis sistematis. Perencanaan bertujuan, menjembatani jurang antara apa yang ada sekarang dengan yang diinginkan pada masa depan. Perbedaan antara keadaan sekarang dan masa depan ini memberikan bahan untuk perencanaan dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai dibidang pendidikan. Itulah sebabnya, perencanaan pendidikan sebagai kegiatan yang kompleks sesuai dengan kompleksitasnya masalah pendidikan.

Demikian pula penganggaran diperlukan sebagai formulasi rencana dalam pengertian uang, berfungsi memanfaatkan sumber-sumber secara efisien, dapat dijadikan alat pengawasan dan penilaian sampai beberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan tercapai (Nanang Fatah, 1996: 68-69).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan atas karya-karya tertulis yaitu buku ataupun jurnal. dengan teknik pengumpulan datanya adalah instrumen studi dokumen. Penggunaan instrumen studi dokumen ini bisa juga disebut sebagai studi pustaka, yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi dokumen dalam penelitian ini mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai konstruksi dan konsensus dalam kebenaran sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perancangan anggaran pembelajaran sekolah memerlukan beberapa Analisa yang wajib dipahami oleh seluruh pemangku kebijakan di lembaga pendidikan, baik dari kalangan penentu kebijakan, sampai kepada pelaksana dan objek dari kebijakan itu, hal ini akan berpengaruh kepada keberlangsungan manajerial yang akan dialami dalam proses pembelajaran. Berikut beberapa analisa yang wajib dimengerti berkaitan dengan perencanaan anggaran belanja sekolah;

1) Penyusunan anggaran.

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, dalam buku Manajemen pendidikan, Lipham mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok sebagai berikut: (a) Merencanakan anggaran; (b) Mempersiapkan anggaran; (c) Mengelola pelaksanaan anggaran; (d) Menilai pelaksanaan anggaran.

2) Proses anggaran belanja sekolah.

Ada tiga macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang biasa dipergunakan di sekolah.

(a) Comparative approach

- (1) Melakukan perbandingan laporan atau catatan penerimaan dengan pengeluaran antara satu tahun anggaran dengan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam keputusan anggaran belanja ini didasarkan pada peningkatan tambahan dari satu hal pada waktunya ke hal yang lain.

(b) The planning programming budgeting evaluating system approach

- (1) Menjabarkan tujuan kedalam program-program ke dalam sarana-sarana khusus.
- (2) Menjabarkan nilai dari masing-masing alternatif.
- (3) Menjabarkan biaya pelaksanaan dan evaluasi masing-masing program.

(c) Function approach

- (1) Proses anggaran dimulai dari tujuan sekolah.
- (2) Termasuk dalam pendekatan ini adalah elemen-elemen yang terkandung dalam pendekatan comparative dan PPBES (Fatah Syukur, 2011: 116).

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). *Budget* merupakan rencana operasional yang

dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber data.

3) Karakteristik anggaran.

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain. Sisi pengeluaran terdiri dari seluruh penerimaan biaya, sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana dan prasarana pendidikan dll (Nanang Fattah, 2004: 47).

4) Fungsi anggaran.

Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat dan lemah. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, anggaran dapat pula dijadikan alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga.

(a) Anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk:

(1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

- (2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
- (3) Mengalokasikan sumber-sumber anggaran pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- (4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- (b) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan antara lain:
 - (1) Mengendalikan efisiensi pengeluaran
 - (2) Membatasi kekuasaan dan wewenang lembaga pendidikan
 - (3) Mencegah adanya *overspending* dan salah sasaran dalam mengalokasikan anggaran dalam suatu lembaga pendidikan.
 - (4) Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program lembaga pendidikan.
- (c) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan anggaran lembaga dan mendorong kemajuan dalam kegiatan lembaga pendidikan.
- (d) Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan anggaran.
- (e) Anggaran dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja.
- (f) Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen pendidikan agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien.
- (g) Anggaran dapat juga sebagai alat untuk menciptakan ruang public, artinya semua jaringan dalam hal pendidikan dapat membarikan manfaat kepada semua bidang pendidikan (Makmun, 2007: 263).

5) Prinsip-prinsip anggaran

Prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut: (a) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam system manajemen dan organisasi; (b) Adanya system akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran; (c) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi; (d) Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana

memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas (Nanang Fattah, 2004: 50).

6) Pengawasan anggaran.

Konsep dasar tentang pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai di mana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Prinsip pengawasan:

- (a) System pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian, kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi.
- (b) Hasil temuan pengawasan harus ditindak lanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi, mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi.
- (c) Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen.
- (d) Kegiatan pengawasan hendaknya member dampak terhadap penyelesaian masalah dengan konseptual dan menyeluruh.
- (e) Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik.
- (f) Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang sangat tinggi.
- (g) Tepat waktu, artinya data yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan.
- (h) Objektif dan komprehensif.
- (i) Tidak mengakibatkan pemborosan
- (j) Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat.
- (k) Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

7) Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS).

RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran berikut ini: a) Asas kecermatan; b) Asas terperinci; c) Asas keseluruhan; d) Asas

keterbukaan; e) Asas periodic; f) Asas pembenaan. Masalah-masalah terkait dengan penyusunan RAPBS: Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama kepala sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan RAPBS. Oleh karena itu, pimpinan itu disarankan menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar itu. berikut ini diuraikan beberapa masalah yang sering muncul dalam proses penyusunan RAPBS.

- (a) Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan tidak didukung pengetahuan yang memadai.
- (b) Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa.
- (c) Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun
- (d) Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan anggaran.
- (e) Permintaan untuk membeli barang bermerek tertentu atau ancaman sentralisasi anggaran.
- (f) Kurangnya pembinaan, komunikasi, dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait (Asmani, 2010: 249).

Strategi penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah):

- (a) Suatu pola keputusan yang integrity, coherent, dan menyatukan di antara setiap komponen.
- (b) Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, program dan prioritas dari alokasi sumber-sumber daya pendidikan.
- (c) Memilih jenis kemampuan, keterampilan, pengetahuan apa saja yang mungkin akan diperlukan oleh masyarakat di masa yang akan datang.
- (d) Merespons dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan dan keunggulan yang ada di pihak lembaga pendidikan.
- (e) Membangun komitmen dari semua pihak, siswa, orangtua, masyarakat, pemerintah, unit-unit Depdikbud sampai pada

internal sekolah (kepala sekolah-siswa) untuk bersama-sama meningkatkan mutu sekolah.

- (f) Menentukan tingkat kontribusi dari setiap input pendidikan yang bermuatan biaya terhadap mutu pendidikan atau prestasi belajar siswa (efisiensi internal) dan angka permintaan masyarakat terhadap lulusan sekolah (efisiensi eksternal) (Nanang Fattah, 2004: 53).

8) *Critical Thinking*

Pendidikan nasional kita dihadapkan kepada masalah antara lain, peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber dayadari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan suatu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.

Jika kita menempatkan posisi pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks masyarakat madani, diperlukan kebaranian investasi yang besar untuk memperkuat sistem pendidikan nasional. Di samping itu diperlukan juga adanya upaya yang sangat serius dalam memperkuat pendidikan sebagai jalan utama kekuatan dengan yang bukan saja sebagai peran konstitusional. Akan tetapi menjadi jawaban terhadap tantangan nyata perkembangan masyarakat dalam kondisi internal menjadi peraturan global. Suatu penganggaran itu tidak hanya dianggarkan, tapi sebelumnya sudah ada planning agar semua anggaran yang ada sesuai dengan apa yang diagendakan, tapi tidak semua planning anggaran itu 100 %. Jadi, untuk menutupi kekurangan itu harus ada planning anggaran tak terduga. Dalam hal ini harus ada pemasukan yang dijadikan jalan keluar apabila anggaran awal melebihi target yang ada.

KESIMPULAN

Perencanaan Anggaran lembaga pendidikan adalah suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu agar lembaga yang ada

dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan. Hal-hal yang terkait dengan perencanaan anggaran lembaga pendidikan yaitu: penyusunan anggaran, merencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, menilai pelaksanaan anggaran, proses anggaran belanja sekolah, karakteristik anggaran, fungsi anggaran, prinsip-prinsip anggaran, pengawasan anggaran, rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS).

REFERENSI

- Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- E. Mulyasa, *Manajemen berbasis sekolah*, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan*, SemarangPT. Pustaka Rizki Putra, 2011
- Gunawan, G., Simanjuntak, M. A., & Marisa, S. (2022). Compulsory Education Phenomenon for Islamic Education in Indonesia. *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal*, 3(1), 10-17.
- Gunawan, G., & Siahaan, A. (2021). *SOURCES OF EDUCATION FUNDS IN SCHOOL REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN EDUCATION FINANCIAL SYSTEM*. *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal*, 2(2).
- Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, Yogyakarta, Diva Press, 2010
- Mesiono, Model Of Education Management Using Qualitative Research Methods At A Private School In Medan, dalam *Kuramve Uygulamada Egitim Yonetim Educational Administration: Theory and Practiceh*, Vol. 28, No. 2, 2022.
- Nanang Fattah, *"Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan"*, Bandung, Rosdakarya, , 2004
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, g, 1996
- Udin Syaifudin Sa'ud Dan Abin Syamsuddin Makmun. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprensif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007